



**PUTUSAN**  
Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusuf Matami Alias Ican
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Oktober 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibarengkok No.49, RT.005 RW.003, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Auditor Dan Pembukuan

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSUF MATAMI Alias ICAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*" melanggar Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda senilai 2 (dua) kali jumlah kerugian pendapatan negara yaitu Rp.2.076.826.807,- (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) x 2 (dua) sehingga sejumlah Rp.4.153.653.614,- (empat milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN bersama sama dengan TAMJIS SODIKIN dan RIDWAN EFENDI BATUBARA, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di KPP Pondok Aren Jl. Bintaro Utama 3A sektor V, jurang mangu Tim Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten; atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (pada pelaporan SPT Masa PPN) bulan Januari Tahun Pajak 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun Pajak 2016 yaitu yang terdiri dari:

Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403.000	223,636,560	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.6411.000	1,648,447,830	164,844,783
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013.000	940,920,280	94,092,028
4	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.6412.000	54,545,455	5,454,545
5	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,450,000,000	245,000,000
Jumlah			5,317,550,125	531,755,012

Januari s.d. Desember 2016 :

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.8411.000	1,770,285,030	177,028,503
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6413.000	841,272,733	84,127,267
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,631,853,420	263,185,342
4	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.722.6411.000	24,636,364	2,463,636
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.168.4411.000	2,092,670,470	209,267,047
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4411.000	3,220,000,000	322,000,000
7	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4411.000	4,870,000,000	487,000,000

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	15,450,718,017	1,545,071,795
--------	----------------	---------------

Jumlah keseluruhan Rp 2.076.826.807  
Terbilang :dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enamribu  
delapan ratus tujuh rupiah

padahal antara PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan-perusahaan tersebut diatas tidak pernah melakukan transaksi sehingga dengan menggunakan Faktur Pajak Masukan yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (FP TBTS) mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, sebanyak Rp.2.076.826.807,- (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000 dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Aren sejak tanggal 19 Maret 2012;
- Bahwa berdasarkan data dalam Master File Wajib Pajak pada aplikasi Portal DJP, PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000 :
  - Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren pada tanggal 14 Agustus 2007;
  - Alamat Wajib Pajak adalah Jln. Mawar Blok C-5 No.10 Rt.003 Rw.007, Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
  - Kegiatan usaha dibidang dagang/distribusi minyak solar, bensin bagi usaha industri;
  - KLU wajib pajak adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (46610);
  - Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Aren sejak tanggal 19 Maret 2012.
- Bahwa susunan pengurus PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, berdasarkan :
  - Akta Notaris MUHAMAD HASAN SULSI nomor 16 tanggal 12 Desember 2013, adalah sebagai berikut :
    - a. Direktur Utama : TAMJIS SODIKIN.
    - b. Direktur : RIDWAN E. BATUBARA.
    - c. Komisaris : VOURY MALINDA.
  - Akta Notaris DR. WIKRAMA IRYANS ABIDIN, S.H., M.Kn nomor 01 tanggal 06 Juli 2015, adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur Utama : TAMJIS SODIKIN.
- b. Direktur : RIDWAN E. BATUBARA.
- c. Komisaris : VOURY MALINDA.
- Akta Notaris DR. WIKRAMA IRYANS ABIDIN, S.H., M.Kn nomor 710 tanggal 27 Januari 2016, adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama : TAMJIS SODIKIN.
  - b. Komisaris Utama : HARTATIK.

- Bahwa pada awal tahun 2015 saksi TAMJIS SODIKIN bertemu dengan saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN di Ruko Golden Point di Ciputat Tangerang Selatan pada pertemuan tersebut saksi TAMJIS SODIKIN menyampaikan bahwa PT. Bangun Putra Sejahtera tidak sanggup membayar penuh selisih antara pajak keluaran (penjualan) dengan pajak masukan (pembelian) karena apabila PPN dibayarkan penuh Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan, selanjutnya saksi TAMJIS SODIKIN meminta pendapat kepada saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN, menanggapi hal tersebut RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN bersedia mencari Faktur Pajak yang berasal dari transaksi pembelian PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan lain yang seolah-olah terjadi transaksi antara PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan lain tersebut padahal transaksi tersebut tidak ada selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan Pajak Masukan PT Bangun Putera Sejahtera. Harga Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi tersebut adalah 40% sampai dengan 50% dari nilai PPN yang seharusnya dibayar, terhadap hal tersebut saksi TAMJIS SODIKIN menyetujui.
- Bahwa untuk memperoleh faktur pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. Bangun Putra Sejahtera RIDWAN EFENDI BATUBARA menghubungi NURCHOLIS untuk memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, untuk faktur pajak dari NURKHOLIS tersebut RIDWAN EFENDI BATUBARA membayar 22% dari nilai PPN yang seharusnya kepada NURKHOLIS, sedangkan RIDWAN EFENDI BATUBARA meminta kepada saksi TAMJIS SODIKIN sebanyak 44% dari nilai PPN untuk pembayaran faktur pajak tersebut sehingga RIDWAN EFENDI BATUBARA mendapatkan keuntungan 22%.

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari SUTIKNO, untuk faktur pajak dari SUTIKNO tersebut terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN membayar 25% dari nilai PPN yang seharusnya kepada SUTIKNO, sedangkan terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN meminta kepada saksi TAMJIS SODIKIN sebanyak 50% dari nilai PPN yang seharusnya untuk pembayaran faktur pajak tersebut sehingga terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN memperoleh keuntungan sebanyak 25% dari nilai PPN yang seharusnya, akan tetapi keuntungan terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN tersebut dibagi lagi atau diserahkan kepada RIDWAN EFENDI BATUBARA sebanyak 12,5% dari nilai PPN yang seharusnya.
- Berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA tahun Pajak 2015 dan tahun pajak 2016 yang telah dilaporkan di kantor Pajak Pratama Pondok Aren adalah sebagai berikut :

- Masa Januari 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
JUMLAH						

- Masa Februari 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
JUMLAH						

- Masa Maret 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH						

- 
- Masa April 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715293	09/04/2015	177,600,000	17,760,000
2	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715294	06/04/2015	181,300,000	18,130,000
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715297	15/04/2015	237,438,380	23,743,838
4	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715298	20/04/2015	266,400,000	26,640,000
JUMLAH					862,738,380	86,273,838

- 
- Masa Mei 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560495	11/05/2015	400,000,000	40,000,000
2	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560496	18/05/2015	430,000,000	43,000,000
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715300	12/05/2015	38,636,400	3,863,640
JUMLAH					868,636,400	86,863,640

- 
- 
- Masa Juni 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
-----	---	------	---	--------------	--------------

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pembatalan			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560502	02/06/2015	400,000,000	40,000,000
2	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560503	08/06/2015	520,000,000	52,000,000
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560504	15/06/2015	360,000,000	36,000,000
4	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560505	22/06/2015	340,000,000	34,000,000
5	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715301	17/06/2015	39,545,500	3,954,550
JUMLAH					1,659,545,500	165,954,550

- Masa Juli 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH						

- Masa Agustus 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5-403.000	010.003-15.58319109	20/08/2015	74,545,520	7,454,552
JUMLAH					74,545,520	7,454,552

- Masa September 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan	Tanggal		

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor Seri	al (dd- mm- yyyy)		
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803. 5-403.000	010.003- 15.5831911 0	16/09/ 2015	149,091,040	14,909,104
JUMLAH					149,091,040	14,909,104

-  
- Masa Oktober 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
JUMLAH						

-  
- Masa November 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739. 6-412.000	010.002- 15.8355997 0	24/11/ 2015	54,545,455	5,454,545
JUMLAH					54,545,455	5,454,545

-  
- Masa Desember 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832. 6-411.000	010.004- 15.4313318 5	04/12/ 2015	400,000,000	40,000,000
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832. 6-411.000	010.004- 15.4313318 6	10/12/ 2015	480,000,000	48,000,000
3	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832. 6-411.000	010.004- 15.4313318 7	18/12/ 2015	440,000,000	44,000,000
4	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832. 6-411.000	010.004- 15.4313318	22/12/ 2015	328,447,830	32,844,783

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8			
JUMLAH				1,648,447,830	164,844,783

- 
- Dari pelaporan SPT Masa PPN selama tahun pajak 2015 tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak yang sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan selama tahun pajak 2015 dengan nilai PPN sebesar Rp 531.755.012,-.
- 

- Masa Januari 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.51 1.8- 411.000	010.030- 16.8354434 6	26/01/ 2016	456,000,00 0	45,600,000
2	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.51 1.8- 411.000	010.030- 16.8354434 7	27/01/ 2016	480,000,00 0	48,000,000
3	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.51 1.8- 411.000	010.030- 16.8354434 8	28/01/ 2016	496,000,00 0	49,600,000
4	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.51 1.8- 411.000	010.030- 16.8354434 9	29/01/ 2016	338,285,03 0	33,828,503
JUMLAH					1,770,285,030	177,028,503

- 
- Masa Februari 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453918 0	03/02/ 2016	36,909,091	3,690,909
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453918 1	10/02/ 2016	40,727,273	4,072,727
3	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453918 2	10/02/ 2016	40,727,273	4,072,727
4	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453918 3	12/02/ 2016	40,727,273	4,072,727
5	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453918 4	12/02/ 2016	40,727,273	4,072,727
6	PT FAJAR PUTRA	02.057.20	010.000-	12/02/	40,727,273	4,072,727

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GALUNGGUNG	4.6-413.000	16.14539185	2016		
7	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539186	13/02/2016	40,727,273	4,072,727
8	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539187	13/02/2016	40,727,273	4,072,727
9	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539189	18/02/2016	40,727,273	4,072,727
10	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539193	22/02/2016	35,636,364	3,563,636
11	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539194	23/02/2016	40,727,273	4,072,727
12	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539195	23/02/2016	40,727,273	4,072,727
13	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.030-16.98715234	24/02/2016	296,000,000	29,600,000
14	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.030-16.98715235	25/02/2016	272,000,000	27,200,000
15	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.030-16.98715236	26/02/2016	280,000,000	28,000,000
16	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.030-16.98715237	29/02/2016	268,633,490	26,863,349
JUMLAH					1,596,451,675	159,645,164

-  
- Masa Maret 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539196	03/03/2016	40,727,273	4,072,727
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539197	04/03/2016	40,727,273	4,072,727
3	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539198	05/03/2016	35,636,364	3,563,636
4	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539199	05/03/2016	40,727,273	4,072,727
5	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6-413.000	010.000-16.14539200	05/03/2016	40,727,273	4,072,727
6	PT FAJAR PUTRA	02.057.204.6-413.000	010.000-	12/03/	40,727,273	4,072,727

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GALUNGGUNG	4.6- 413.000	16.1453920 1	2016		
7	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453920 2	11/03/ 2016	40,727,273	4,072,727
8	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453920 4	16/03/ 2016	40,727,273	4,072,727
9	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.20 4.6- 413.000	010.000- 16.1453920 5	16/03/ 2016	40,727,273	4,072,727
10	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	02.593.72 4.4- 027.000	010.001- 16.1157939 2	07/03/ 2016	68,555,862	6,855,586
11	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	02.593.72 4.4- 027.000	010.001- 16.1157947 5	11/03/ 2016	22,325,758	2,232,576
12	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	02.593.72 4.4- 027.000	010.001- 16.1157961 2	19/03/ 2016	23,904,347	2,390,435
13	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871523 8	01/03/ 2016	280,000,00 0	28,000,000
14	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871523 9	08/03/ 2016	352,000,00 0	35,200,000
15	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871524 0	15/03/ 2016	320,000,00 0	32,000,000
16	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871524 1	22/03/ 2016	312,000,00 0	31,200,000
17	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871524 2	29/03/ 2016	251,219,93 0	25,121,993
JUMLAH					1,991,460, 445	199,146,042

-  
- Masa April 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.72 2.6- 411.000	010.030- 16.9443995 0	01/04/ 2016	24,636,364	2,463,636
2	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.16 8.4- 411.000	010.031- 16.8052241 5	18/04/ 2016	400,000,00 0	40,000,000
3	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.16 8.4- 411.000	010.031- 16.8052241 6	20/04/ 2016	360,000,00 0	36,000,000
4	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.16 8.4- 411.000	010.031- 16.8052241 7	22/04/ 2016	480,000,00 0	48,000,000
5	PT TEKNIK CATUR	72.240.16	010.031-	25/04/	520,000,00	52,000,000

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUKSES	8.4- 411.000	16.8052241 8	2016	0	
6	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.16 8.4- 411.000	010.031- 16.8052241 9	27/04/ 2016	332,670,47 0	33,267,047
JUMLAH					2,117,306, 834	211,730,683

- Masa Mei 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871525 4	03/05/ 2016	0	0
2	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871525 5	10/05/ 2016	0	0
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871525 6	17/05/ 2016	0	0
4	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.14 4.5- 411.000	010.030- 16.9871525 7	24/05/ 2016	0	0
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051924 9	31/05/ 2016	69,824,000	6,982,400
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275523 2	12/05/ 2016	416,000,00 0	41,600,000
7	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275523 3	13/05/ 2016	400,000,00 0	40,000,000
8	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275523 4	17/05/ 2016	424,000,00 0	42,400,000
9	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275523 5	24/05/ 2016	410,000,00 0	41,000,000
JUMLAH					1,719,824, 000	171,982,400

- Masa Juni 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2-	010.031- 16.7051926	04/06/ 2016	34,912,000	3,491,200

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		451.000	6			
2	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051926 7	04/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
3	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051927 8	08/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
4	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051927 9	08/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051928 4	09/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
6	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051928 5	09/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
7	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051928 8	10/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
8	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051929 3	11/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
9	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051929 6	13/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
10	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051931 4	16/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
11	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051932 1	18/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
12	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051932 2	18/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
13	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051934 7	23/06/ 2016	69,824,000	6,982,400
14	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051936 5	28/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
15	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051937 1	30/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
16	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051937 2	30/06/ 2016	34,912,000	3,491,200
17	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275523 8	01/06/ 2016	392,000,00 0	39,200,000
18	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275523 9	09/06/ 2016	390,000,00 0	39,000,000
19	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275524 0	16/06/ 2016	388,000,00 0	38,800,000
20	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.83 3.4- 411.000	010.032- 16.7275524 1	23/06/ 2016	400,000,00 0	40,000,000
JUMLAH					2,372,976, 000	237,297,600

- Masa Juli 2016

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051941 1	22/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
2	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051941 2	22/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
3	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051941 8	23/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
4	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051941 9	23/07/ 2016	69,824,000	6,982,400
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051942 4	25/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
6	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051942 5	25/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
7	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.031- 16.7051943 5	26/07/ 2016	69,824,000	6,982,400
8	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147854 3	15/07/ 2016	144,000,00 0	14,400,000
9	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147854 4	19/07/ 2016	176,000,00 0	17,600,000
10	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147854 5	22/07/ 2016	168,000,00 0	16,800,000
11	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147854 6	26/07/ 2016	152,000,00 0	15,200,000
12	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957675 4	28/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
13	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957675 5	28/07/ 2016	34,912,000	3,491,200
14	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957676 2	29/07/ 2016	69,824,000	6,982,400
JUMLAH					1,093,856, 000	109,385,600

- Agustus 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan	Tanggal		

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor Seri	al (dd- mm- yyyy)		
1	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147856 1	02/08/ 2016	280,000,00 0	28,000,000
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147856 2	09/08/ 2016	320,000,00 0	32,000,000
3	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147856 3	15/08/ 2016	260,000,00 0	26,000,000
4	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147856 4	22/08/ 2016	240,000,00 0	24,000,000
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957677 8	02/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
6	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957677 9	02/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
7	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957678 4	03/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
8	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957680 3	05/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
9	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957680 4	05/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
10	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957681 9	08/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
11	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957682 0	08/08/ 2016	72,000,000	7,200,000
12	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957683 0	09/08/ 2016	72,000,000	7,200,000
13	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957683 6	10/08/ 2016	72,000,000	7,200,000
14	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957684 7	11/08/ 2016	72,000,000	7,200,000
15	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.23 9.2- 451.000	010.033- 16.2957685 4	12/08/ 2016	36,000,000	3,600,000
JUMLAH					1,640,000, 000	164,000,000

-  
- September 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm-		

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				yyyy)		
1	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147857 8	01/09/ 2016	320,000,00 0	32,000,000
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147857 9	08/09/ 2016	332,000,00 0	33,200,000
3	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147858 0	15/09/ 2016	338,000,00 0	33,800,000
4	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984151 8	08/09/ 2016	74,181,760	7,418,176
5	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984151 9	08/09/ 2016	37,090,880	3,709,088
6	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984152 0	09/09/ 2016	74,181,760	7,418,176
7	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984152 1	11/09/ 2016	37,090,880	3,709,088
8	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984152 2	15/09/ 2016	74,181,760	7,418,176
9	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984152 3	15/09/ 2016	74,181,760	7,418,176
10	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984152 4	16/09/ 2016	74,181,760	7,418,176
JUMLAH					1,435,090, 560	143,509,056

-  
-  
-  
- Oktober 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147859 3	13/10/ 2016	340,000,00 0	34,000,000
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.032- 16.9147859 4	20/10/ 2016	320,000,00 0	32,000,000
3	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984154 6	09/10/ 2016	148,363,52 0	14,836,352
4	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984154 7	18/10/ 2016	148,363,52 0	14,836,352
5	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5-	010.033- 16.6984154	21/10/ 2016	199,363,48 0	19,936,348

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		453.001	8			
6	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984154 9	28/10/ 2016	148,363,52 0	14,836,352
7	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.033- 16.6984155 9	29/10/ 2016	333,817,92 0	33,381,792
JUMLAH					1,638,271, 960	163,827,196

- November 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.034- 16.6342309 7	28/11/ 2016	315,000,00 0	31,500,000
2	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.034- 16.6342309 8	24/11/ 2016	500,000,00 0	50,000,000
3	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.034- 16.6342310 0	30/11/ 2016	267,500,00 0	26,750,000
4	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.034- 16.6620626 7	29/11/ 2016	210,000,00 0	21,000,000
JUMLAH					1,292,500, 000	129,250,000

- Desember 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT LAROS PETROLEUM	03.329.20 9.5- 453.001	010.034- 16.6342313 3	26/12/ 2016	183,136,22 0	18,313,622
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.034- 16.6620627 4	06/12/ 2016	420,000,00 0	42,000,000
3	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.034- 16.6620627 5	13/12/ 2016	440,000,00 0	44,000,000
4	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.73 1.4- 411.000	010.034- 16.6620627 6	20/12/ 2016	410,000,00 0	41,000,000
JUMLAH					1,453,136, 220	145,313,622

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pelaporan SPT Masa PPN selama tahun pajak 2016 tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak yang sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan selama tahun pajak 2016 dengan nilai PPN sebesar Rp 2.012.115.866,-.
- Bahwa faktur pajak yang dikreditkan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA pada tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diperoleh dari NURCHOLIS melalui RIDWAN EFENDI BATUBARA dan faktur pajak yang diperoleh dari SUTIKNO melalui terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN, yaitu sebagai berikut :
- Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403.00	223,636,560	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.6411.00	1,648,447,830	164,844,783
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013.00	940,920,280	94,092,028
4	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.6412.00	54,545,455	5,454,545
5	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,450,000,000	245,000,000
Jumlah			5,317,550,125	531,755,012
No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.8411.00	1,770,285,030	177,028,503
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6413.00	841,272,733	84,127,267
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,631,853,420	263,185,342
4	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.722.6411.00	24,636,364	2,463,636
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.168.4411.00	2,092,670,470	209,267,047
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4411.00	3,220,000,000	322,000,000
7	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4411.00	4,870,000,000	487,000,000
Jumlah			15,450,718,017	1,545,071,795

- Januari s.d. Desember 2016 :

Jumlah keseluruhan

Rp 2.076.826.807

Terbilang : dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah

- Bahwa perbuatan saksi TAMJIS SODIKIN bersama sama dengan RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN, menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FPTBTS) selama kurun waktu tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan keuangan negara yang seharusnya diperoleh negara senilai Rp. 2.076.826.807,- (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN bersama sama dengan TAMJIS SODIKIN dan RIDWAN EFENDI BATUBARA, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di KPP Pondok Aren Jl. Bintaro Utama 3A sektor V, jurang mangu Tim Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten; atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (pada pelaporan SPT Masa PPN) Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 dengan memasukan data yang isinya seolah-olah terjadi transaksi antara PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA dengan beberapa perusahaan yaitu:

## Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403.000	223,636,560	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.6411.000	1,648,447,830	164,844,783
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013.000	940,920,280	94,092,028
4	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.6412.000	54,545,455	5,454,545
5	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,450,000,000	245,000,000
Jumlah			5,317,550,125	531,755,012

## Januari s.d. Desember 2016 :

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.8411.000	1,770,285,030	177,028,503
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.6413.000	841,272,733	84,127,267
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,631,853,420	263,185,342
4	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.722.6411.000	24,636,364	2,463,636
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.168.4411.000	2,092,670,470	209,267,047
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4411.000	3,220,000,000	322,000,000
7	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4411.000	4,870,000,000	487,000,000
Jumlah			15,450,718,017	1,545,071,795

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





Jumlah keseluruhan Rp 2.076.826.807  
Terbilang :dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu

delapan ratus tujuh rupiah;

Padaahal transaksi tersebut tidak ada, sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, sebanyak Rp.2.076.826.807,- (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000 dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Aren sejak tanggal 19 Maret 2012;
- Bahwa berdasarkan data dalam Master File Wajib Pajak pada aplikasi Portal DJP, PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000:
  - Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren pada tanggal 14 Agustus 2007;
  - Alamat Wajib Pajak adalah Jln. Mawar Blok C-5 No.10 Rt.003 Rw.007, Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
  - Kegiatan usaha dibidang dagang/distribusi minyak solar, bensin bagi usaha industri;
  - KLU wajib pajak adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (46610);
  - Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Aren sejak tanggal 19 Maret 2012.
- Bahwa susunan pengurus PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, berdasarkan:
  - Akta Notaris MUHAMAD HASAN SULSI nomor 16 tanggal 12 Desember 2013, adalah sebagai berikut :
    - a. Direktur Utama : TAMJIS SODIKIN.
    - b. Direktur : RIDWAN E. BATUBARA.
    - c. Komisaris : VOURY MALINDA.
  - Akta Notaris DR. WIKRAMA IRYANS ABIDIN, S.H., M.Kn nomor 01 tanggal 06 Juli 2015, adalah sebagai berikut :
    - a. Direktur Utama : TAMJIS SODIKIN.
    - b. Direktur : RIDWAN E. BATUBARA.
    - c. Komisaris : VOURY MALINDA.
  - Akta Notaris DR. WIKRAMA IRYANS ABIDIN, S.H., M.Kn nomor 710 tanggal 27 Januari 2016, adalah sebagai berikut :
    - a. Direktur Utama : TAMJIS SODIKIN.



b. Komisaris Utama : HARTATIK.

- Bahwa pada awal tahun 2015 saksi TAMJIS SODIKIN bertemu dengan saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN di Ruko Golden Point di Ciputat Tangerang Selatan pada pertemuan tersebut saksi TAMJIS SODIKIN menyampaikan bahwa PT. Bangun Putra Sejahtera tidak sanggup membayar penuh selisih antara pajak keluaran (penjualan) dengan pajak masukan (pembelian) karena apabila PPN dibayarkan penuh Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan, selanjutnya saksi TAMJIS SODIKIN meminta pendapat kepada saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN, menanggapi hal tersebut RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN bersedia mencari Faktur Pajak yang berasal dari transaksi pembelian PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan lain yang seolah-olah terjadi transaksi antara PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan lain tersebut padahal transaksi tersebut tidak ada selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan Pajak Masukan PT Bangun Putera Sejahtera. Harga Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi tersebut adalah 40% sampai dengan 50% dari nilai PPN yang seharusnya dibayar, terhadap hal tersebut saksi TAMJIS SODIKIN menyetujui.
- Bahwa untuk memperoleh faktur pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. Bangun Putra Sejahtera terdakwa RIDWAN EFENDI BATUBARA menghubungi NURCHOLIS untuk memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, untuk faktur pajak dari NURKHOLIS tersebut terdakwa RIDWAN EFENDI BATUBARA membayar 22% dari nilai PPN yang seharusnya kepada NURKHOLIS, sedangkan terdakwa RIDWAN EFENDI BATUBARA meminta kepada saksi TAMJIS SODIKIN sebanyak 44% dari nilai PPN untuk pembayaran faktur pajak tersebut sehingga terdakwa RIDWAN EFENDI BATUBARA mendapatkan keuntungan 22%..
- Sedangkan JUSUF MATAMI alias ICAN memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari SUTIKNO, untuk faktur pajak dari SUTIKNO tersebut YUSUF MATAMI alias ICAN membayar 25% dari nilai PPN yang seharusnya kepada SUTIKNO, sedangkan YUSUF MATAMI alias ICAN meminta kepada saksi TAMJIS SODIKIN sebanyak 50% dari nilai PPN yang seharusnya untuk pembayaran faktur pajak tersebut sehingga YUSUF MATAMI alias ICAN memperoleh keuntungan sebanyak 25% dari

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai PPN yang seharusnya, akan tetapi keuntungan YUSUF MATAMI alias ICAN tersebut dibagi lagi atau diserahkan kepada terdakwa RIDWAN EFENDI BATUBARA sebanyak 12,5% dari nilai PPN yang seharusnya.

- Bahwa data transaksi yang tidak sebenarnya tersebut disampaikan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA tahun Pajak 2015 dan tahun pajak 2016 dan telah dilaporkan di kantor Pajak Pratama Pondok Aren adalah sebagai berikut:

Masa Januari 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
JUMLAH						

Masa Februari 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
JUMLAH						

Masa Maret 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
JUMLAH						

Masa April 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
-----	--	------	---	-----------------	-----------------

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberi JKP		Pembatalan			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715293	09/04/2015	177,600,000	17,760,000
2	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715294	06/04/2015	181,300,000	18,130,000
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715297	15/04/2015	237,438,380	23,743,838
4	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715298	20/04/2015	266,400,000	26,640,000
JUMLAH					862,738,380	86,273,838

Masa Mei 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560495	11/05/2015	400,000,000	40,000,000
2	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560496	18/05/2015	430,000,000	43,000,000
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7-013.000	010.002-15.33715300	12/05/2015	38,636,400	3,863,640
JUMLAH					868,636,400	86,863,640

Masa Juni 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	010.001-15.27560502	02/06/2015	400,000,000	40,000,000
2	PT YAYA	72.240.144	010.001-	08/06/	520,000,	52,000,0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUNA SUKSES	.5-411.000	15.27560503	2015	000	00
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144 .5-411.000	010.001-15.27560504	15/06/2015	360,000,000	36,000,000
4	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144 .5-411.000	010.001-15.27560505	22/06/2015	340,000,000	34,000,000
5	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971 .7-013.000	010.002-15.33715301	17/06/2015	39,545,500	3,954,550
JUMLAH					1,659,545,500	165,954,550

Masa Juli 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH						

Masa Agustus 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803 .5-403.000	010.003-15.58319109	20/08/2015	74,545,520	7,454,552
JUMLAH					74,545,520	7,454,552

Masa September 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803 .5-403.000	010.003-15.583191	16/09/2015	149,091,040	14,909,104

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10			
<b>JUMLAH</b>				149,091,040	14,909,104

Masa Oktober 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
<b>JUMLAH</b>						

Masa November 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739 .6-412.000	010.002- 15.835599 70	24/11/ 2015	54,545,4 55	5,454,54 5
<b>JUMLAH</b>					54,545,4 55	5,454,54 5

Masa Desember 2015

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832 .6-411.000	010.004- 15.431331 85	04/12/ 2015	400,000, 000	40,000,0 00
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832 .6-411.000	010.004- 15.431331 86	10/12/ 2015	480,000, 000	48,000,0 00
3	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832 .6-411.000	010.004- 15.431331 87	18/12/ 2015	440,000, 000	44,000,0 00
4	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832 .6-411.000	010.004- 15.431331 88	22/12/ 2015	328,447, 830	32,844,7 83
<b>JUMLAH</b>					1,648,44	164,844,

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7,830	783
--	-------	-----

Dari pelaporan SPT Masa PPN selama tahun pajak 2015 tersebut diketahui bahwa data transaksi yang tidak benar dalam Faktur Pajak tersebut yang sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan selama tahun pajak 2015 dengan nilai PPN sebesar Rp 531.755.012,-.

Masa Januari 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.5 11.8- 411.000	010.030- 16.835443 46	26/01/ 2016	456,00 0,000	45,600,0 00
2	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.5 11.8- 411.000	010.030- 16.835443 47	27/01/ 2016	480,00 0,000	48,000,0 00
3	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.5 11.8- 411.000	010.030- 16.835443 48	28/01/ 2016	496,00 0,000	49,600,0 00
4	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.5 11.8- 411.000	010.030- 16.835443 49	29/01/ 2016	338,28 5,030	33,828,5 03
<b>JUMLAH</b>					1,770,2 85,030	177,028, 503

Masa Februari 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 80	03/02/ 2016	36,909, 091	3,690,90 9
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 81	10/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
3	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 82	10/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
4	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 83	12/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
5	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 84	12/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 85	12/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
7	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 86	13/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
8	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 87	13/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
9	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 89	18/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
10	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 93	22/02/ 2016	35,636, 364	3,563,63 6
11	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 94	23/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
12	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 95	23/02/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
13	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 34	24/02/ 2016	296,00 0,000	29,600,0 00
14	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 35	25/02/ 2016	272,00 0,000	27,200,0 00
15	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 36	26/02/ 2016	280,00 0,000	28,000,0 00
16	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 37	29/02/ 2016	268,63 3,490	26,863,3 49
<b>JUMLAH</b>					1,596,4 51,675	159,645, 164

Masa Maret 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 96	03/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 97	04/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
3	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 98	05/03/ 2016	35,636, 364	3,563,63 6
4	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145391 99	05/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145392 00	05/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
6	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145392 01	12/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
7	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145392 02	11/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
8	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145392 04	16/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
9	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.2 04.6- 413.000	010.000- 16.145392 05	16/03/ 2016	40,727, 273	4,072,72 7
10	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	02.593.7 24.4- 027.000	010.001- 16.115793 92	07/03/ 2016	68,555, 862	6,855,58 6
11	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	02.593.7 24.4- 027.000	010.001- 16.115794 75	11/03/ 2016	22,325, 758	2,232,57 6
12	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	02.593.7 24.4- 027.000	010.001- 16.115796 12	19/03/ 2016	23,904, 347	2,390,43 5
13	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 38	01/03/ 2016	280,00 0,000	28,000,0 00
14	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 39	08/03/ 2016	352,00 0,000	35,200,0 00
15	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 40	15/03/ 2016	320,00 0,000	32,000,0 00
16	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 41	22/03/ 2016	312,00 0,000	31,200,0 00
17	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 42	29/03/ 2016	251,21 9,930	25,121,9 93
JUMLAH					1,991,4 60,445	199,146, 042

Masa April 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.7 22.6- 411.000	010.030- 16.944399 50	01/04/ 2016	24,636, 364	2,463,63 6
2	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.1 68.4- 411.000	010.031- 16.805224 15	18/04/ 2016	400,00 0,000	40,000,0 00

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.1 68.4- 411.000	010.031- 16.805224 16	20/04/ 2016	360,00 0,000	36,000,0 00
4	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.1 68.4- 411.000	010.031- 16.805224 17	22/04/ 2016	480,00 0,000	48,000,0 00
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.1 68.4- 411.000	010.031- 16.805224 18	25/04/ 2016	520,00 0,000	52,000,0 00
6	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.1 68.4- 411.000	010.031- 16.805224 19	27/04/ 2016	332,67 0,470	33,267,0 47
<b>JUMLAH</b>					<b>2,117,3 06,834</b>	<b>211,730, 683</b>

Masa Mei 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm- yyyy)		
1	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 54	03/05/ 2016	0	0
2	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 55	10/05/ 2016	0	0
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 56	17/05/ 2016	0	0
4	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.1 44.5- 411.000	010.030- 16.987152 57	24/05/ 2016	0	0
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 49	31/05/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.8 33.4- 411.000	010.032- 16.727552 32	12/05/ 2016	416,00 0,000	41,600,0 00
7	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.8 33.4- 411.000	010.032- 16.727552 33	13/05/ 2016	400,00 0,000	40,000,0 00
8	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.8 33.4- 411.000	010.032- 16.727552 34	17/05/ 2016	424,00 0,000	42,400,0 00
9	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.8 33.4- 411.000	010.032- 16.727552 35	24/05/ 2016	410,00 0,000	41,000,0 00
<b>JUMLAH</b>					<b>1,719,8 24,000</b>	<b>171,982, 400</b>

Masa Juni 2016

No.	Nama Penjual BKP/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
-----	----------------------	------	-------------------------	-----------------	-----------------

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP		Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		)	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 66	04/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
2	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 67	04/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
3	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 78	08/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
4	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 79	08/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 84	09/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
6	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 85	09/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
7	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 88	10/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
8	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 93	11/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
9	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705192 96	13/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
10	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 14	16/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
11	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 21	18/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
12	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 22	18/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
13	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 47	23/06/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
14	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 65	28/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
15	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 71	30/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
16	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.031- 16.705193 72	30/06/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
17	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.8 33.4- 411.000	010.032- 16.727552 38	01/06/ 2016	392,00 0,000	39,200,0 00

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4-411.000	010.032-16.72755239	09/06/2016	390,000,000	39,000,000
19	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4-411.000	010.032-16.72755240	16/06/2016	388,000,000	38,800,000
20	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4-411.000	010.032-16.72755241	23/06/2016	400,000,000	40,000,000
JUMLAH					2,372,976,000	237,297,600

Masa Juli 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519411	22/07/2016	34,912,000	3,491,200
2	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519412	22/07/2016	34,912,000	3,491,200
3	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519418	23/07/2016	34,912,000	3,491,200
4	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519419	23/07/2016	69,824,000	6,982,400
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519424	25/07/2016	34,912,000	3,491,200
6	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519425	25/07/2016	34,912,000	3,491,200
7	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-451.000	010.031-16.70519435	26/07/2016	69,824,000	6,982,400
8	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4-411.000	010.032-16.91478543	15/07/2016	144,000,000	14,400,000
9	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4-411.000	010.032-16.91478544	19/07/2016	176,000,000	17,600,000
10	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4-411.000	010.032-16.91478545	22/07/2016	168,000,000	16,800,000
11	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.4-411.000	010.032-16.91478546	26/07/2016	152,000,000	15,200,000
12	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.239.2-	010.033-16.295767	28/07/2016	34,912,000	3,491,200

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		451.000	54			
13	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295767 55	28/07/ 2016	34,912, 000	3,491,20 0
14	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295767 62	29/07/ 2016	69,824, 000	6,982,40 0
JUMLAH					1,093,8 56,000	109,385, 600

Agustus 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 61	02/08/ 2016	280,00 0,000	28,000,0 00
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 62	09/08/ 2016	320,00 0,000	32,000,0 00
3	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 63	15/08/ 2016	260,00 0,000	26,000,0 00
4	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 64	22/08/ 2016	240,00 0,000	24,000,0 00
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295767 78	02/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
6	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295767 79	02/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
7	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295767 84	03/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
8	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 03	05/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
9	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 04	05/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
10	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 19	08/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
11	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 20	08/08/ 2016	72,000, 000	7,200,00 0
12	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 30	09/08/ 2016	72,000, 000	7,200,00 0
13	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2-	010.033- 16.295768	10/08/ 2016	72,000, 000	7,200,00 0

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		451.000	36			
14	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 47	11/08/ 2016	72,000, 000	7,200,00 0
15	PT ISANO LOPO INDUSTRI	01.869.2 39.2- 451.000	010.033- 16.295768 54	12/08/ 2016	36,000, 000	3,600,00 0
<b>JUMLAH</b>					1,640,0 00,000	164,000, 000

September 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 78	01/09/ 2016	320,00 0,000	32,000,0 00
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 79	08/09/ 2016	332,00 0,000	33,200,0 00
3	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 80	15/09/ 2016	338,00 0,000	33,800,0 00
4	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 18	08/09/ 2016	74,181, 760	7,418,17 6
5	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 19	08/09/ 2016	37,090, 880	3,709,08 8
6	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 20	09/09/ 2016	74,181, 760	7,418,17 6
7	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 21	11/09/ 2016	37,090, 880	3,709,08 8
8	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 22	15/09/ 2016	74,181, 760	7,418,17 6
9	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 23	15/09/ 2016	74,181, 760	7,418,17 6
10	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 24	16/09/ 2016	74,181, 760	7,418,17 6
<b>JUMLAH</b>					1,435,0 90,560	143,509, 056

Oktober 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota	DPP (Rupiah )	PPN (Rupiah)
-----	--	------	---	---------------------	-----------------

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberi JKP		Pembatalan			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 93	13/10/ 2016	340,00 0,000	34,000,0 00
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.032- 16.914785 94	20/10/ 2016	320,00 0,000	32,000,0 00
3	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 46	09/10/ 2016	148,36 3,520	14,836,3 52
4	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 47	18/10/ 2016	148,36 3,520	14,836,3 52
5	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 48	21/10/ 2016	199,36 3,480	19,936,3 48
6	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 49	28/10/ 2016	148,36 3,520	14,836,3 52
7	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.033- 16.698415 59	29/10/ 2016	333,81 7,920	33,381,7 92
JUMLAH					1,638,2 71,960	163,827, 196

November 2016

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.034- 16.634230 97	28/11/ 2016	315,00 0,000	31,500,0 00
2	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.034- 16.634230 98	24/11/ 2016	500,00 0,000	50,000,0 00
3	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.034- 16.634231 00	30/11/ 2016	267,50 0,000	26,750,0 00
4	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.034- 16.662062 67	29/11/ 2016	210,00 0,000	21,000,0 00
JUMLAH					1,292,5 00,000	129,250, 000

Desember 2016

No.	Nama Penjual	NPWP	Faktur	DPP	PPN
-----	--------------	------	--------	-----	-----

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP		Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		(Rupiah )	(Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tangg al (dd- mm- yyyy)		
1	PT LAROS PETROLEUM	03.329.2 09.5- 453.001	010.034- 16.634231 33	26/12/ 2016	183,13 6,220	18,313,6 22
2	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.034- 16.662062 74	06/12/ 2016	420,00 0,000	42,000,0 00
3	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.034- 16.662062 75	13/12/ 2016	440,00 0,000	44,000,0 00
4	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.7 31.4- 411.000	010.034- 16.662062 76	20/12/ 2016	410,00 0,000	41,000,0 00
JUMLAH					1,453,1 36,220	145,313, 622

Dari pelaporan SPT Masa PPN selama tahun pajak 2015 tersebut diketahui bahwa data transaksi yang tidak benar dalam Faktur Pajak tersebut dan sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan selama tahun pajak 2016 dengan nilai PPN sebesar Rp 2.012.115.866,-.

- Bahwa data transaksi yang tidak benar yang dilaporkan pada tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016 yang merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diperoleh dari NURCHOLIS melalui RIDWAN EFENDI BATUBARA dan yang diperoleh dari SUTIKNO melalui JUSUF MATAMI alias ICAN, yaitu sebagai berikut :

Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403. 000	223,636,56 0	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.6411. 000	1,648,447,8 30	164,844,78 3
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013. 000	940,920,28 0	94,092,028
4	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.6412. 000	54,545,455 2,450,000,0	5,454,545 245,000,00
5	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5- 411.000	00 00	0 0
Jumlah			5,317,550,1 25	531,755,01 2

Januari s.d. Desember 2016 :

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.8411. 000	1,770,285,03 0	177,028,50 3
2	PT FAJAR PUTRA	02.057.204.6413.	841,272,733	84,127,267

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUNGGUNG		000		
		72.240.144.5-	2,631,853,42	263,185,34
3	PT YAYA GUNA SUKSES	411.000	0	2
	PT BUMI ASRI PRIMA	72.549.722.6411.		
4	PRATAMA	000	24,636,364	2,463,636
		72.240.168.4411.	2,092,670,47	209,267,04
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	000	0	7
		72.249.833.4411.	3,220,000,00	322,000,00
6	PT KONALA SUKSES ABADI	000	0	0
		72.138.731.4411.	4,870,000,00	487,000,00
7	PT DUTA GADING MAKMUR	000	0	0
Jumlah			15,450,718,0	1,545,071,7
			17	95

Jumlah keseluruhan Rp 2.076.826.807

Terbilang :dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus duapuluhenam ribu delapan ratus tujuh rupiah

- Bahwa perbuatanTerdakwa **TAMJIS SODIKIN** bersama sama dengan saksi **RIDWAN EFENDI BATUBARA**, dan saksi **JUSUF MATAMI** alias **ICAN**, *menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak (pada pelaporan SPT Masa PPN) Tahun Pajak 2015dan Tahun Pajak 2016, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan keuangan negara yang seharusnya diperoleh negara senilai **Rp.2.076.826.807,-(dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).***

Perbuatan Terdakwa **TAMJIS SODIKIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Haris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan persidangan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa TAMJIS SODIKIN.
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren sejak tahun 2018.
  - Bahwa saksi turut melakukan kunjungan ke PT TEKNIK CATUR SUKSES pada tanggal 30 Juli 2020, namun pada saat saksi tiba di

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, saksi menemukan bahwa tempat tersebut adalah rumah yang kosong;

- Bahwa saksi hanya melakukan kunjungan (visit) terhadap 1 (satu) perusahaan saja, yaitu PT TEKNIK CATUR SUKSES;
- Bahwa PT TEKNIK CATUR SUKSES tersebut melaporkan wajib pajaknya selama 2 (dua) tahun, sejak Juli 2015 sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada pelaporan sebelum tahun tersebut ada kejanggalan atau tidak karena saksi awalnya hanya melihat dari sistem saja;
- sebelum dilakukan kunjungan (visit) oleh saksi, PT TEKNIK CATUR SUKSES juga pernah dikunjungi oleh Account Representative lain, dan hasilnya pun tidak ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Bahwa **SEPTIYANI DWI ANGGRAINI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan persidangan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa TAMJIS SODIKIN.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Account Representative pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Pondok Aren sejak tahun 2018.
- Saksi bertugas untuk mengawasi PT. YAYA GUNA SUKSES dengan NPWP 72.240.144.5-411.000. yang beralamat di Jalan Wadas Sari, Pondok Aren pada bulan November 2018 kunjungan (visit) terakhir pada PT. YAYA GUNA SUKSES dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020, dimana Wajib Pajak tidak diketemukan. PT. YAYA GUNA SUKSES terakhir melakukan pelaporan dari Maret 2015 sampai dengan April 2016.
- Bahwa dalam perkara ini Saksi juga bertugas untuk mengawasi PT. MUTIARA PERMAI SEJAHTERA dengan NPWP 71.967.511.8-411.000 yang beralamat di Jalan Wadas Sari, Pondok Aren. Bahwa PT. MUTIARA PERMAI SEJAHTERA terakhir melaporkan pajak dari Oktober 2015 sampai dengan Februari 2017 setelah itu tidak ada pelaporan lagi dari PT. MUTIARA PERMAI SEJAHTERA.
- Bahwa terhadap PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA Saksi tidak pernah melakukan kunjungan (visit) dan sepengetahuan Saksi terhdap PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA itu sudah pernah dilakukan kunjungan (visit) oleh Account Representative sebelumnya.

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu PT. YAYA GUNA SUKSES dan PT. MUTIARA PERMAI SEJAHTERA Saksi tidak dapat mengetahui apakah transaksi yang dilaporkan real atau tidak karena Saksi hanya bisa melihat dari data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak saja.
- Bahwa Saksi mengetahui PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, berdasarkan data pada sistem informasi administrasi perpajakan (SIDJP) sebagai Wajib Pajak yang masuk dalam administrasi perpajakan yang Saksi tangani sejak tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa Sesuai dengan data dalam Master File Wajib Pajak pada aplikasi Portal DJP, PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren pada tanggal 14 Agustus 2007, Alamat Wajib Pajak PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000 berdasarkan data master file wajib pajak adalah di Jln. Mawar Blok C-5 No.10 Rt.003 Rw.007, Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- Berdasarkan data pada sistem informasi administrasi perpajakan (SIDJP) faktur pajak yang dikreditkan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA pada tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan Jumlah keseluruhan Rp.2.076.826.807 (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), perincian sebagai berikut:

Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403.000	223,636,560	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.6411.000	1,648,447,830	164,844,783
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013.000	940,920,280	94,092,028
4	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.6412.000	54,545,455	5,454,545
5	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,450,000,000	245,000,000
Jumlah			5,317,550,125	531,755,012

Januari s.d. Desember 2016 :

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI	71.967.511.841	1,770,285,	177,028,503

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



	SEJAHTERA	1.000	030	
	PT FAJAR PUTRA	02.057.204.641	841,272,73	
2	GALUNGGUNG	3.000	3	84,127,267
		72.240.144.5-	2,631,853,	
3	PT YAYA GUNA SUKSES	411.000	420	263,185,342
	PT BUMI ASRI PRIMA	72.549.722.641		
4	PRATAMA	1.000	24,636,364	2,463,636
		72.240.168.441	2,092,670,	
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	1.000	470	209,267,047
	PT KONALA SUKSES	72.249.833.441	3,220,000,	
6	ABADI	1.000	000	322,000,000
	PT DUTA GADING	72.138.731.441	4,870,000,	
7	MAKMUR	1.000	000	487,000,000
	Jumlah		15,450,718	1,545,071,79
			,017	5

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SARI RAHMAYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan persidangan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa TAMJIS SODIKIN.
- Bahwa perkara ini Saksi bertugas untuk mengawasi PT. KONALA SUKSES ABADI dengan NPWP 722498334411. Saksi telah melakukan pengecekan ke lokasi PT. KONALA SUKSES ABADI dan tidak ditemukan. Menurut Saksi, PT. KONALA SUKSES ABADI terdaftar atau tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Direkturnya yaitu Sdr. Ari Setiawan, dan melakukan pelaporan data terakhir pada Januari 2016 dan selanjutnya tidak pernah melakukan pelaporan lagi.
- Bahwa kewajiban dari PT. KONALA SUKSES ABADI adalah melaporkan PPN termasuk juga SPT tahunan.
- Bahwa PT. KONALA SUKSES ABADI bergerak dibidang bisnis dagang besar atas balas jasa kontrak.
- Bahwa menurut Saksi sebelum Saksi bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, Account Representative sebelumnya telah melakukan kunjungan (visit) terhadap PT. KONALA SUKSES ABADI.
- Bahwa alasan dilakukan kunjungan (visit) terhadap PT. KONALA SUKSES ABADI untuk memastikan apakah perusahaan tersebut secara fisik ada atau tidak di lokasi.
- Bahwa terhadap PT. KONALA SUKSES ABADI, Saksi sudah melakukan kunjungan atau (visit) sebanyak 1 (satu) kali dan nama PT. KONALA SUKSES ABADI tidak dikenal atau tidak diketahui oleh orang yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lokasi. Dan fisik gedung PT. KONALA SUKSES ABADI tidak ditemukan..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DIMAS GHAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa TAMJIS SODIKIN Saksi belum diperiksa di hadapan persidangan namun diperiksa oleh penyidik pada tahap penyidikan.
- Bahwa kaitan dengan perkara ini Saksi bertugas Account Representative untuk mengawasi PT DUTA GADING MAKMUR.
- Bahwa terhadap PT DUTA GADING MAKMUR Saksi pernah melakukan kunjungan (visit) dan sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi beberapa warga sekitar, mereka menyatakan tidak tahu keberadaan PT DUTA GADING MAKMUR dan tidak mengenal Sdr. HANDOKO KUSNADI selaku direktur perusahaan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **LUKMAN HAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan persidangan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa TAMJIS SODIKIN. Saat ini saksi juga sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Salemba atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pesanan faktur pajak (fiktif) dari seseorang yang bernama H. SUGITO dan JAMES DANIEL GULTOM atas perusahaan-perusahaan bernama PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA, PT YAYA GUNA SUKSES, PT CITRA INDO PRADANA, PT DUTA GADING MAKMUR, PT KONALA SUKSES ABADI dan PT TEKNIK CATUR SUKSES.
- Bahwa saksi tidak mengenal CV TRI INTA KARSATAMA, PT SINAR ARTHA NUSA, PT SURYA AGUNG MISBAL, PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA, dan PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG.
- Bahwa Faktur-Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) yang tidak ada penyerahan barang dan atau jasanya. Saksi tidak tahu Faktur Pajak

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikreditkan atau digunakan sebagai Pajak Masukan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA.

- Bahwa setiap ada pesanan yang selesai, akan saksi lanjutkan kepada saksi SEPI MUHARAM alias REFFI Als CEPI.
- Bahwa hubungan saksi dengan SEPI MUHARAM, ialah yang bersangkutan dulu di tahun 2011 awalnya memohon kepada Saksi agar diikutsertakan dalam proses bisnis Faktur Pajak. Kemudian dia membantu saksi membawa kendaraan pribadi untuk mengantar saksi dalam kegiatan sehari-hari, baru sekitar tahun 2012 s.d 2014 saksi mulai kasih order faktur pajak kepada SEPI MUHARAM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **TAMJIS SODIKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dan saat ini sedang proses upaya hukum kasasi. Pada kedua tingkat peradilan Saksi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa, kurang lebih pada Tahun 2013 Saksi mendirikan perusahaan dengan nama PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA.
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang bahan bakar Solar, dimana Saksi akan membeli bahan bakar Solar dan dijual kembali untuk industri.
- Saksi mengajak RIDWAN EFENDI BATUBARA mendirikan Perusahaan tersebut dan RIDWAN EFENDI BATUBARA sempat menjadi direktur keuangan.
- Bahwa dikarenakan Saksi tidak memahami masalah perpajakan maupun keuangan, Saksi menanyakan kepada Ridwan Efendi Batubara, siapa nanti yang akan mengurus masalah perpajakan dan keuangan. Ridwan Efendi Batubara mengenalkan Terdakwa ke JUSUF MATAMI Als ICAN dimana JUSUF MATAMI Als ICAN diketahui sebagai konsultan pajak. Jadi kalau ada Pre-Order atau penjualan, JUSUF MATAMI Als ICAN yang akan mengurus masalah perpajakan dan Saksi mempercayakan hal tersebut kepada RIDWAN EFENDI BATUBARA dan JUSUF MATAMI Als ICAN.
- Bahwa mengenai permasalahan perusahaan Saksi percayakan kepada RIDWAN EFENDI BATUBARA.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai adanya faktur pajak yang tidak sesuai dimana tujuannya untuk meringankan Wajib Pajak, Saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui adanya laporan dari RIDWAN EFENDI BATUBARA mengenai biaya operasional kantor seperti pembayaran gaji pegawai dan pembayaran biaya listrik. setelah itu, Saksi akan membuka cek dan Saksi memberikan uang tunai kepada RIDWAN EFENDI BATUBARA untuk dilakukan pembayaran. Selebihnya Saksi tidak mengetahui apakah, dibayarkan atau tidak.
- Bahwa berkaitan dengan faktur pajak yang didapatkan tanpa adanya transaksi sebenarnya, Saksi tidak mengetahui dari mana didapatkan. yang mengerjakan dan mendapatkan faktur pajak adalah RIDWAN EFENDI BATUBARA dan JUSUF MATAMI Als ICAN, dikarenakan hal tersebut telah Saksi percayakan kepada RIDWAN EFENDI BATUBARA dan JUSUF MATAMI Als ICAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **RIDWAN EFENDI BATUBARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan TAMJIS SODIKIN sejak tahun 2013 karena hubungan pekerjaan, dimana saksi menjalankan perusahaan milik TAMJIS SODIKIN yaitu PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA sebagai staff administrasi yang mengurus masalah laporan keuangan dan masalah pajak.
- Bahwa TAMJIS SODIKIN berkedudukan sebagai Direktur Utama pada PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA namun hal tersebut bukan keinginan saksi.
- Bahwa TAMJIS SODIKIN pernah menyuruh saksi mengurus hal yang berkaitan dengan masalah pajak dibantu oleh teman saksi yaitu Terdakwa JUSUF HATAMI untuk melakukan pemindahan dari KPP Bekasi menuju KPP Serpong.
- Bahwa TAMJIS SODIKIN awalnya meminta kepada saksi untuk mencari seseorang yang mengerti terkait dengan pajak, karena TAMJIS SODIKIN dan saksi tidak mengerti dengan hal terkait permasalahan pajak. Kebetulan JUSUF MATAMI yang merupakan teman dari saksi mengerti mengenai pajak, sehingga JUSUF HATAMI lah yang melakukan pengurusan terkait dengan pajak.

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap bulannya memberikan laporan kepada TAMJIS SODIKIN dengan bentuk tulisan atau lisan, sehingga setiap ada pengeluaran yang harus dibayar di setiap bulannya, nanti TAMJIS SODIKIN akan transfer kepada saksi.
- Bahwa laporan yang disampaikan saksi kepada TAMJIS SODIKIN ialah meliputi laporan gaji, kebutuhan kantor berupa listrik dan ATK, serta keperluan untuk membayar pajak.
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pemasukan. Terkait pemasukan perusahaan ini, terkadang masuk ke rekening perusahaan, terkadang juga langsung masuk ke rekening TAMJIS SODIKIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana angka dari pajak yang harus dibayar itu didapatkan, karena yang mengurus hal tersebut adalah JUSUF HATAMI. Pada intinya, Terdakwa akan menginformasikan kepada JUSUF HATAMI terkait dengan perpajakan di setiap bulannya kemudian saksi melaporkan kepada TAMJIS SODIKIN untuk pengeluarannya. Selebihnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang bertugas melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA ialah JUSUF HATAMI.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA satu kali, dikarenakan TAMJIS SODIKIN pada saat itu tidak berada di lokasi.
- Bahwa atas pengurusan pajak yang dilakukan oleh JUSUF HATAMI, JUSUF MATAMI diberikan upah atau fee layaknya gaji bulanan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani saksi pada saat penyidikan, saksi mengakui bahwa benar saksi pernah ditawarkan faktur pajak oleh Pak NURCHOLIS. Kemudian atas pembayaran yang disepakati yaitu 22% dari nilai PPN seharusnya merupakan termasuk pembayaran PPN yang dilaporkan di SPT Masa PPN. Setelah uang saksi terima dari TAMJIS SODIKIN, baru kemudian saksi melakukan pembayaran PPN ke Bank dan melaporkannya ke KPP Pratama Pondok Aren. Kemudian baru jumlah 22% dari nilai PPN seharusnya, saksi serahkan kepada Pak NURCHOLIS yang dilakukan secara Transfer. Yang menyuruh saksi untuk membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44





kepada Pak NURCHOLIS adalah TAMJIS SODIKIN.

- Bahwa benar saksi ada membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya guna dikreditkan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Perpajakan dan Ahli Penghitung Kerugian Negara, **AGUS SRI HARYANTO**, setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keterkaitan dengan tersangka yang bernama RIDWAN EFENDI BATUBARA.
- Bahwa Menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan dalam kronologi merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA.
- Bahwa menurut pendapat Ahli dasar hukum perpajakan tersebut dan apabila pada kurun waktu masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 wajib pajak tidak melaporkan pajak yang sebenarnya adalah Sebagaimana dimaksud Pasal 39A huruf a UU KUP yaitu dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa Penghitungan kerugian pada pendapatan negara sbb:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000 menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas perusahaan-perusahaan sbb:

Januari s.d. Desember 2015:

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403.000	223,636,560	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.6411.000	1,648,447,830	164,844,783
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013.000	940,920,280	94,092,028
4	PT SURYA MISBAL AGUNG	72.972.739.6412.000	54,545,455	5,454,545
5	PT YAYA SUKSES GUNA	72.240.144.5.411.000	2,450,000,000	245,000,000
Grand Total			5,317,550,125	531,755,012

Januari s.d. Desember 2016:

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.8411.000	1,770,285,030	177,028,503
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGUNG	02.057.204.6413.000	841,272,733	84,127,267
3	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5-411.000	2,631,853,420	263,185,342
4	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.722.6411.000	24,636,364	2,463,636
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.168.4411.000	2,092,670,470	209,267,047
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.4411.000	3,220,000,000	322,000,000
7	PT DUTA MAKAMUR GADING	72.138.731.4411.000	4,870,000,000	487,000,000
Grand Total			15,450,718,017	1,545,071,795

Pajak yang tidak atau kurang dibayar tahun 2015 : Rp. 531.755.012,-

Pajak yang tidak atau kurang dibayar tahun 2015 : Rp. 1.545.071.795,- (+)

**Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar : Rp. 2.076.826.807**

Terbilang : dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah;

- Bahwa Ahli dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RIDWAN EFENDI BATUBARA dan Saksi JUSUF MATAMI alias ICAN masing-masing merupakan Direktur dan Freelance PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA yang turut serta membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) UU KUP.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Bahwa menurut Ahli, Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU KUP, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang KUP).
- Menurut Ahli, Sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-undang PPN yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- Bahwa Ahli menjelaskan bentuk-bentuk Faktur Pajak tersebut yaitu Faktur Pajak dapat berbentuk: E-faktur (faktur pajak berbentuk elektronik) atau Kertas (hardcopy). Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP136/PJ/2014, Penerbitan Faktur Pajak wajib dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.
- Menurut Ahli Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerbitkan suatu faktur pajak adalah persyaratan formal dan persyaratan material. Hal tersebut juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, baik secara formal maupun secara material.
- Bahwa Ahli menjelaskan Syarat yang menjadi sah tidaknya sebuah Faktur Pajak adalah apabila :
  - a. Dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP.
  - b. Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP.
  - c. Faktur Pajak harus benar secara formal dan material.(Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN).

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai perkembangan teknologi sekarang ini, DJP telah memiliki dan menerapkan Teknologi dalam pelayanan, pengelolaan dan pengawasan hak dan kewajiban perpajakan. Salah satu aplikasi yang dapat membantu untuk melihat data atau informasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPTnya salah satu di antaranya adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat SIDJP, dan Aplikasi Konfirmasi PKPM di Portal DJP.
- Ahli menjelaskan bahwa dalam hal ditemukan kasus pidana di bidang perpajakan yang terjadi pada tahun pajak 2015 dan 2016, Yang dimaksud dengan unsur menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak sebagaimana tercantum Pasal 39A huruf a UU KUP dapat Ahli jelaskan bahwa Kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak sehingga “menerbitkan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- Ahli menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada Negara bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak.
- Bahwa menurut Ahli SIDJP dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalam Sistem Informasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JUSUF MATAMI Als ICAN**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 10 Oktober 1960, Pekerjaan: Auditor dan Pembukuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Kp. Cibarengkok No. 49 RT.005, RW.003 Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat), didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA awalnya dari RIDWAN BATUBARA alias IWAN dan dikenalkan kepada TAMJIS SODIKIN tahun 2013 untuk membantu menyusun laporan keuangan dan pajak PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA.
- Bahwa kegiatan usaha Wajib Pajak PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan / distribusi minyak solar (High Speed Diesel/HSD untuk industri.
- Bahwa Faktur Pajak tanpa berdasarkan transaksi sebenarnya berasal dari Saksi namun hanya sampai masa April 2015, sedangkan masa sesudahnya Terdakwa tidak tahu. Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya Terdakwa peroleh dari SUTIKNO.
- Bahwa Faktur Pajak tanpa berdasarkan transaksi sebenarnya berasal dari Terdakwa namun atas pembayaran sebesar 50% dari PPN itu benar tapi jumlah tersebut tidak buat Terdakwa semuanya tapi dibagi dua masing-masing 25% dengan Pak SUTIKNO sebagai penjual faktur. Dari jumlah 25% tersebut Terdakwa bagi dua lagi dengan Pak Iwan sehingga jumlah yang Terdakwa dan pak Iwan terima masing-masing 12,5% dari nilai PPN. Sedangkan terkait keuntungan, Terdakwa menyebutnya fee atau upah atas faktur pajak yang hanya dibayarkan sebesar 50% dari jumlah PPN seharusnya.
- Bahwa yang melaporkan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak dari PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, tahun pajak 2015 (Januari s.d. April) adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan setelah itu Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya kepada Pak SUTIKNO adalah Saudara TAMJIS SODIKIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA awalnya dari RIDWAN BATUBARA alias IWAN dan dikenalkan kepada TAMJIS SODIKIN tahun 2013 untuk membantu menyusun laporan keuangan dan pajak PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kegiatan usaha Wajib Pajak PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan / distribusi minyak solar (High Speed Diesel/HSD untuk industri;
- Bahwa Faktur Pajak tanpa berdasarkan transaksi sebenarnya berasal dari Terdakwa namun atas pembayaran sebesar 50% dari PPN itu benar tapi jumlah tersebut tidak buat Terdakwa semuanya tapi dibagi dua masing-masing 25% dengan Pak SUTIKNO sebagai penjual faktur. Dari jumlah 25% tersebut Terdakwa bagi dua lagi dengan Pak Iwan sehingga jumlah yang Terdakwa dan pak Iwan terima masing-masing 12,5% dari nilai PPN. Sedangkan terkait keuntungan, Terdakwa menyebutnya fee atau upah atas faktur pajak yang hanya dibayarkan sebesar 50% dari jumlah PPN seharusnya;
- Bahwa yang melaporkan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak dari PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, tahun pajak 2015 (Januari s.d. April) adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan setelah itu Terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Melanggar Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil kuasa, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak yang lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
3. Sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa **JUSUF MATAMI Alias ICAN** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

**Ad. 2 Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil kuasa, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pidak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "*dengan sengaja*" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "*opzet*" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dari Frank yang didukung Von Lost.

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. Moeljatno (dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata

*Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng*



Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Sedangkan di dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa.
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku, selain itu unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Ahli AGUS SRI HARYANTO yang dimaksud dengan unsur menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak sebagaimana tercantum Pasal 39A huruf a UU KUP adalah berasal dari Kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak sehingga “menerbitkan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Sedangkan kata “guna” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “faedah, manfaat” dan kata “menggunakan” berarti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga “menggunakan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang



memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada Negara Bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak.

Menimbang, bahwa Pemaknaan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” yang diperluas ini terkait dengan berkembangnya sistem pemungutan PPN yang tidak lagi mengutamakan fisik faktur pajak namun dalam bentuk elektronik faktur pajak yang tidak perlu dicetak, sehingga dapat terjadi pajak masukan yang dilaporkan pembeli dalam SPT Masa PPN tidak didukung fisik faktur pajaknya. Dalam hal seperti itu, tentu saja tidak ada fisik faktur pajak namun terdapat pengakuan/klaim dari penjual bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Oleh karenanya penjual mempunyai kewajiban kepada Negara atas pengakuan/klaim tersebut untuk menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan melaporkan dalam SPT Masa PPN dan bagi pembeli yang menerima faktur pajak berhak mengkreditkan sejumlah pajak yang telah dipungut oleh penjual untuk mengurangi utang pajak pada SPT Masa PPN.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” seperti yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-undang KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/ klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI, Saksi SARI RAHMAYANTI, Saksi AKHMAD HARIS Saksi DIMAS GHAFAR, Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi TAMJIS SODIKIN, dan SAKSI RIDWAN EFENDI BATUBARA dengan alat bukti lain yaitu Keterangan Ahli AGUS SRI HARYANTO dan keterangan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI, Saksi SARI RAHMAYANTI, Saksi AKHMAD HARIS dan Saksi DIMAS GHAFAR yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN, diketahui bahwa pada tahun pajak 2015 terdapat pelaporan yang isinya seolah-olah terjadi transaksi antara PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA terhadap beberapa perusahaan yaitu CV TRI INTA KARSATAMA, PT CITRA INDO PRADANA, PT SINAR ARTHA NUSA, PT SURYA AGUNG MISBAL dan PT YAYA GUNA SUKSES selanjutnya berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun pajak 2016 terdapat pelaporan yang isinya seolah-olah terjadi transaksi antara PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA terhadap beberapa perusahaan yaitu PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA, PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG, PT YAYA GUNA SUKSES, PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA, PT TEKNIK CATUR SUKSES, PT KONALA SUKSES ABADI dan PT DUTA GADING MAKMUR sedangkan berdasarkan hasil kunjungan (visit) para Saksi yang merupakan Account Representative pada masing-masing perusahaan tersebut, diketahui bahwa terhadap lokasi alamat yang dicatumkan tidak ditemukan keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut, warga sekitar juga tidak mengetahui mengenai adanya perusahaan dan tidak mengenal direktur perusahaan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TAMJIS SODIKIN, Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa pada awal tahun 2015 Saksi TAMJIS SODIKIN selaku Direktur Utama PT. Bangun Putra Sejahtera (*Dilakukan penuntutan secara terpisah/ yang perkaranya telah terbukti pada 2 (dua) tingkat peradilan yaitu Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2022/PN Tng. tanggal 20 Desember 2022 dan Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT.BTN. tanggal 7 Februari 2023 yang saat ini perkaranya dalam upaya hukum kasasi*) pernah bertemu dengan Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA selaku Direktur PT. Bangun Putra Sejahtera dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN di Ruko

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



Golden Point di Ciputat Tangerang Selatan pada pertemuan tersebut Saksi TAMJIS SODIKIN menyampaikan bahwa PT. Bangun Putra Sejahtera tidak sanggup membayar penuh selisih antara pajak keluaran (penjualan) dengan pajak masukan (pembelian) karena apabila PPN dibayarkan penuh Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan, selanjutnya Saksi TAMJIS SODIKIN meminta pendapat kepada Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN, menanggapi hal tersebut Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA, dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN bersedia mencari Faktur Pajak yang berasal dari transaksi pembelian PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan lain yang seolah-olah terjadi transaksi antara PT. Bangun Putra Sejahtera dengan perusahaan lain tersebut padahal transaksi tersebut tidak ada, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan Pajak Masukan PT Bangun Putera Sejahtera;

- Bahwa untuk memperoleh faktur pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. Bangun Putra Sejahtera Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA menghubungi NURCHOLIS untuk memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, untuk faktur pajak dari NURKHOLIS tersebut Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA membayar 22% dari nilai PPN yang seharusnya kepada NURKHOLIS, sedangkan Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA meminta kepada saksi TAMJIS SODIKIN sebanyak 44% dari nilai PPN untuk pembayaran faktur pajak tersebut sehingga Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA mendapatkan keuntungan 22%.
- Sedangkan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari SUTIKNO, untuk faktur pajak dari SUTIKNO tersebut Terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN membayar 25% dari nilai PPN yang seharusnya kepada SUTIKNO, sedangkan Terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN meminta kepada Saksi TAMJIS SODIKIN sebanyak 50% dari nilai PPN yang seharusnya untuk pembayaran faktur pajak tersebut sehingga Terdakwa YUSUF MATAMI alias





ICAN memperoleh keuntungan sebanyak 25% dari nilai PPN yang seharusnya, akan tetapi keuntungan Terdakwa YUSUF MATAMI alias ICAN tersebut dibagi lagi atau diserahkan kepada Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA sebanyak 12,5% dari nilai PPN yang seharusnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM didapatkan fakta hukum bahwa Saksi pernah mendapatkan pesanan faktur pajak (fiktif) dari seseorang atas perusahaan-perusahaan bernama PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA, PT YAYA GUNA SUKSES, PT CITRA INDO PRADANA, PT DUTA GADING MAKMUR, PT KONALA SUKSES ABADI dan PT TEKNIK CATUR SUKSES dimana Faktur-Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) yang tidak ada penyerahan barang dan atau jasanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI berdasarkan data pada sistem informasi administrasi perpajakan (SIDJP) yang diakses oleh Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI selaku Account Representative pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Pondok Aren yang salah satunya memiliki tugas mengawasi PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA diketahui bahwa faktur pajak yang dikreditkan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA pada tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan Jumlah keseluruhan Rp.2.076.826.807 (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), perincian sebagai berikut:

Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA	31.288.803.5403	223,636,56	
	KARSATAMA	.000	0	22,363,656
2	PT CITRA INDO	72.249.832.6411	1,648,447,	
	PRADANA	.000	830	164,844,783
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.7013	940,920,28	94,092,028

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.000	0	
	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.6412		
4		.000	54,545,455	5,454,545
		72.240.144.5-	2,450,000,	
5	PT YAYA GUNA SUKSES	411.000	000	245,000,000
	Jumlah		5,317,550,125	531,755,012

Januari s.d. Desember 2016

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.841	1,770,285,03	
1		1.000	0	177,028,503
	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.641		
2		3.000	841,272,733	84,127,267
		72.240.144.5-	2,631,853,42	
3	PT YAYA GUNA SUKSES	411.000	0	263,185,342
	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	72.549.722.641		
4		1.000	24,636,364	2,463,636
	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.168.441	2,092,670,47	
5		1.000	0	209,267,047
	PT KONALA SUKSES	72.249.833.441	3,220,000,00	
6	ABADI	1.000	0	322,000,000
	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.441	4,870,000,00	
7		1.000	0	487,000,000
	Jumlah		15,450,718,017	1,545,071,795

Berdasarkan uraian di atas telah didapatkan cukup setidaknya 2 (dua) alat bukti yang dapat menggambarkan fakta hukum bahwa telah terjadi penggunaan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dijadikan pajak masukan atau dikreditkan oleh perusahaan PT. Bangun Putra Sejahtera sehingga menimbulkan bukti atau pengakuan/ klaim bahwa atas transaksi tersebut suatu pihak (perusahaan-perusahaan lawan transaksi) telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh PT. Bangun Putra Sejahtera dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara.

Perbutan tersebut terjadi atas permintaan dan persetujuan dari Saksi TAMJIS DODIKIN selaku Direktur Utama PT. Bangun Putra Sejahtera dan diperolehnya faktur pajak tersebut, atas **bantuan**

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



dari Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA selaku Direktur PT. Bangun Putra Sejahtera dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN yang atas perbuatan tersebut terdapat keuntungan yang didapatkan oleh Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum, yakni bahwa benar telah terjadi penggunaan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dikreditkan/ dijadikan pajak masukan pada perusahaan PT. Bangun Putra Sejahtera guna mengurangi pajak yang harus disetor PT. Bangun Putra Sejahtera kepada Negara, di mana diperolehnya faktur pajak tersebut, atas **bantuan** dari Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA selaku Direktur PT. Bangun Putra Sejahtera dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN dan atas perbuatan tersebut terdapat keuntungan yang didapatkan oleh Saksi RIDWAN EFENDI BATUBARA dan Terdakwa JUSUF MATAMI alias ICAN;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara” akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan di dalam frase “sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara” mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian

*Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng*



secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut;

Menimbang bawa Kerugian pada pendapatan negara merupakan bagian dari kerugian negara atau bagian dari kerugian keuangan negara. Kerugian pada pendapatan negara adalah kerugian negara atau kerugian keuangan negara pada sisi pendapatan negara berupa penerimaan pajak.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, frasa kerugian pada pendapatan negara yang terdapat pada muatan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dapat dipahami sebagai kekurangan pada pendapatan negara berupa penerimaan pajak yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa Menurut Ahli AGUS SRI HARYANTO Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Maksud dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ini adalah menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak, dalam hal ini dengan terjadinya penggunaan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dikreditkan/ dijadikan pajak masukan pada perusahaan PT. Bangun Putra Sejahtera guna mengurangi pajak yang harus disetor PT. Bangun Putra Sejahtera kepada negara menimbulkan konsekuensi hilangnya potensi pendapatan keuangan negara yang seharusnya diperoleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI, Saksi SARI RAHMAYANTI, Saksi AKHMAD HARIS Saksi DIMAS GHAFAR, Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi TAMJIS SODIKIN, dengan alat bukti lain yaitu Keterangan Ahli AGUS SRI HARYANTO, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI berdasarkan data pada sistem informasi administrasi perpajakan (SIDJP) yang akses oleh Saksi SEPTIYANI DWI ANGGRAINI selaku Account Representative pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Pondok Aren yang salah satunya memiliki tugas mengawasi PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA diketahui bahwa faktur pajak yang dikreditkan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA pada tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp.2.076.826.807 (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), perincian sebagai berikut:

Januari s.d. Desember 2015

No.	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.540 3.000	223,636,56 0	22,363,656
2	PT CITRA INDO PRADANA	72.249.832.641 1.000	1,648,447, 830	164,844,78 3
3	PT SINAR ARTHA NUSA	31.315.971.701 3.000	940,920,28 0	94,092,028
4	PT SURYA AGUNG MISBAL	72.972.739.641 2.000	54,545,455 2,450,000,	5,454,545 245,000,00
5	PT YAYA GUNA SUKSES	72.240.144.5- 411.000	000 000	0 0
Jumlah			5,317,550, 125	531,755,01 2

Januari s.d. Desember 2016:

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA	71.967.511.841 1.000	1,770,285, 030	177,028,50 3
2	PT FAJAR PUTRA GALUNGGUNG	02.057.204.641 3.000	841,272,73 3	84,127,267 263,185,34
3	PT YAYA GUNA SUKSES PT BUMI ASRI PRIMA	72.240.144.5- 411.000	2,631,853, 420	263,185,34 2
4	PRATAMA	72.549.722.641 1.000	24,636,364 2,092,670,	2,463,636 209,267,04
5	PT TEKNIK CATUR SUKSES	72.240.168.441 1.000	470 3,220,000,	7 322,000,00
6	PT KONALA SUKSES ABADI	72.249.833.441 1.000	000 4,870,000,	0 487,000,00
7	PT DUTA GADING MAKMUR	72.138.731.441 1.000	000 000	0 0
Jumlah			15,450,718 ,017	1,545,071, 795

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli AGUS SRI HARYANTO atas Penghitungan kerugian pada pendapatan negara sbb :
- PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA, NPWP 02.665.452.5-411.000 menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas perusahaan-perusahaan sbb :

Januari s.d. Desember 2015 :

Januari s.d. Desember 2016 :

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
1	CV TRI INTA KARSATAMA	31.288.803.5403 .000	223,636,56 0	22,363,656
2	PT CITRA INDO	72.249.832.6411	1,648,447,	164,844,78

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>PRADANA</b>	.000	830	3
		31.315.971.7013	940,920,28	
<b>3</b>	<b>PT SINAR ARTHA NUSA</b>	.000	0	94,092,028
	<b>PT SURYA AGUNG</b>	72.972.739.6412		
<b>4</b>	<b>MISBAL</b>	.000	54,545,455	5,454,545
		72.240.144.5-	2,450,000,	245,000,00
<b>5</b>	<b>PT YAYA GUNA SUKSES</b>	411.000	000	0
	<b>Grand Total</b>		<b>5,317,550</b>	<b>531,755,0</b>
			<b>,125</b>	<b>12</b>

No	Nama WP	NPWP	DPP	PPN
<b>1</b>	<b>PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA</b>	71.967.511.8411.00	1,770,285,030	177,028,503
<b>2</b>	<b>PT FAJAR PUTRA GALUNGUNG</b>	02.057.204.6413.00	841,272,733	84,127,267
		72.240.144.5-	2,631,853,42	
<b>3</b>	<b>PT YAYA GUNA SUKSES</b>	411.000	0	263,185,342
	<b>PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA</b>	72.549.722.6411.00	24,636,364	2,463,636
<b>4</b>	<b>PT TEKNIK CATUR SUKSES</b>	72.240.168.4411.00	2,092,670,47	
<b>5</b>	<b>ABADI</b>	72.249.833.4411.00	3,220,000,00	
<b>6</b>	<b>PT DUTA GADING MAKMUR</b>	72.138.731.4411.00	4,870,000,00	
<b>7</b>			0	487,000,000
	<b>Grand Total</b>		<b>15,450,718,017</b>	<b>1,545,071,795</b>

Pajak yang tidak atau kurang dibayar tahun 2015 Rp 531.755.012  
Pajak yang tidak atau kurang dibayar tahun 2016 Rp 1.545.071.795  
**Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar Rp 2.076.826.807**  
Terbilang : dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah

Sehingga terdapat potensi pendapatan negara yang hilang dimana seharusnya diperoleh negara dan atas hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp.2.076.826.807 (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah dipenuhi semuanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan keuangan negara yang seharusnya diperoleh negara senilai Rp.2.076.826.807,- (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya pada proses persidangan;

Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUSUF MATAMI Alias ICAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" melanggar Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda senilai 2 (dua) kali jumlah kerugian pendapatan negara yaitu Rp.2.076.826.807,- (dua milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) x 2 (dua) sehingga sejumlah Rp.4.153.653.614,- (empat milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Azwar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo , S.H., M.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H..

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H., M.H

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)